RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya akhirnya Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 telah terselesaikan. maksud disusunnya dokumen ini adalah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 bertujuan secara umum sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 masih banyak keterbatasan sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Akhirnya, semoga dokumen Renja RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dapat menjadi pedoman awal bagi penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Indragiri Hilir, Februari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NURRAHMAN, SE., M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19791223 199905 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 11

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 12

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 12

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 15

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 15

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 16

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 19

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

BAB. V PENUTUP 22

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026.
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel	2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2026 melalui tahapan – tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan penyusunan
   - Pembentukan Tim Penyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026
   - Pengumpulan materi (hasil evaluasi renja, pengendalian kegiatan dan RKPD)
2) Penyusunan rancangan awal
   - Koordinasi dengan Bidang, Pejabat Fungsional Perencana dan pengampu kepentingan.
   - Desk dengan pengampu kegiatan

3) Penyusunan rancangan

- Sinkronisasi dan Dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026
- Masukan dari pelaksana kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;

- Melaksanakan FGD dengan mengundang : DPRD, OPD terkait, Perguruan Tinggi , dan Pemangku Kepentingan yang terkait lainnya

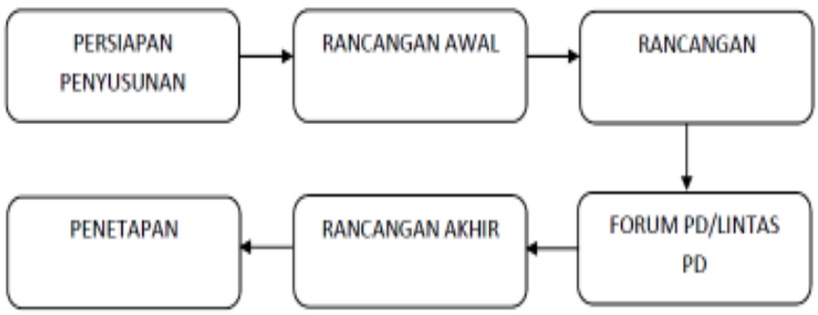
5) Perumusan rancangan akhir

- Penyempurnaan Dokumen

6) Penetapan

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir



Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah penjabaran dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2024–2026 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir 2026

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1) Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2026.
2) Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708/2020 tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sebagai acuan dan tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaia kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2026 yang sesuai tugas, pokok, dan fungsi.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

1 Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026;

2 Mengelola upaya–upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target–target kinerja, sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Renja tahun 2024 dan Renstra hingga tahun 2026;

3 Menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD BKAD Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan untuk :

1) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

2) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;

3) mengetahui realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi fakto-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra PD

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Indragiri Hilir selama Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 Total Anggaran BKAD Kabupaten Indragiri Hilir sebesar RP. 352.231.713.606,- yang dialokasikan untuk pelaksanaan 3 Program dan 12 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan. capaian kinerja pada tahun berjalan terealisasi sebesar Rp. 331.862.877.805,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94,22 %.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan pencapaian Renstra BKAD Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kebupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program, kegiatan dan Sub kegiatan (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran (Kegiatan/sub kegiatan) s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2022			Target program ,Kegiatan, Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	19	19	19	19	100	19	57	300
5.02.01.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Dokren dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun.	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.01.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	72	72	72	72	100	72	216	300
5.02.01.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji ASN	1	1	1	1	100	1	3	300
5.02.01.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	60	60	60	60	100	60	180	300

5.02.01.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi	100	0	100	100	100	100	200	200
5.02.01.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	34	0	0	0	0	34	34	100
5.02.01.02.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan	4	0	4	4	100	4	8	200
5.02.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	11	11	11	11	100	11	33	300
5.02.01.02.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	6	6	6	6	100	6	18	300
5.02.01.02.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4	4	4	4	100	4	12	300
5.02.01.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik yang disediakan	6	6	6	6	100	6	18	300
5.02.01.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaaan	12	12	12	12	100	12	36	300
5.02.01.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan	3200	3200	3200	3200	100	3200	9600	300
5.02.01.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	100	100	100	176	176	100	376	376
5.02.01.02.07.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	0	0	0	0	100	100	100
5.02.01.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang terlayani	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	3	3	3	3	100	3	9	300

5.02.01.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga pelaksana yang di bayarkan	19	19	19	19	100	19	57	300
5.02.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.01.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/operasional/lapangan yang dipellihara	75	75	75	42	56	75	192	256
5.02.01.02.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset teatp lainnya yang dipelihara	75	75	75	75	100	75	225	300
5.02.01.02.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	0	0	0	0	2	2	100
5.02.01.02.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	257	257	257	257	100	257	771	300
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Nota kesepakatan KUA/PPAS yang diterbitkan	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.02.02.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Nota Kesepakatan Perubahan KUPA/PPAS yang diterbitkan	8	8	8	2	25	8	18	225
5.02.02.02.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun	8	8	8	8	100	8	24	300
5.02.02.02.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.02.02.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran yang dilaksanakan	5	5	5	5	100	5	15	300

5.02.02.02.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya yang dilaksanakan	29	29	29	29	100	29	87	300
5.02.02.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK) yang disusun	24	24	24	24	100	24	72	300
5.02.02.02.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Realisasi Pengeluaran Kas berdasarkan SP2D yang dapat diselenggarakan	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.02.02.02.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun	100	2	2	2	100	100	104	104
5.02.02.02.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semeteran yang disusun	4	4	4	4	100	4	12	300
5.02.02.02.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun	2	2	2	2	100	2	6	300

5.02.02.02.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang disusun	4	4	4	4	100	4	12	300
5.02.02.02.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah yang disusun	1	1	1	1	100	1	3	300
5.02.02.02.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah persentase anggaran Subsidi terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	0	100	0	0	0	0	100	0
5.02.02.02.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah persentase anggaran dana desa dan alokasi dana desa terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah persentase anggaran dana darurat dan mendesak terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.04.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah persentase anggaran dana bagi hasil terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.02.02.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah yang diimplementasikan dan terpelihara	2	2	2	2	100	2	6	300

5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu	90	80	80	80	100	90	250	277,78
5.02.03.02.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100	100	100	100	100	100	300	300
5.02.03.02.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah yang disusun	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.03.02.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diinventarisasi	10	10	10	10	100	10	30	300
5.02.03.02.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	terlaksananya pengamanan barang milik daerah	4	4	4	4	100	4	12	300
5.02.03.02.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah penggunaaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah yang dioptimalisasikan	2	2	2	2	100	2	6	300
5.02.03.02.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah rekonsiliasi laporan barang milik daerah yang disusun	10	10	10	10	100	10	30	300
5.02.03.02.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan	3	3	3	3	100	3	9	300

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja BKAD tahun 2023 pada tabel 2.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja	Faktor Penghambat
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan masih dalam kondisi yang memadai

2. Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	2	3
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi antar bidang
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Komitmen dari semua elemen

3. Realisasi program/kegiatan/ Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor

Realisasi Pelaksanaan Renja sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari serapan anggaran, ada beberapa kegiatan yang perlu diefektifkan. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pengelolaan

Keuangan dalam hal Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan tambahan pengetahuan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat tidak semua aparatur memiliki latar belakang Pengelolaan Keuangan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja diatas, disimpulkan sebagai berikut:

7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 3 Program. Target kinerja program meliputi:
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
   c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

8. Untuk mendukung pelaksanaan dari program dan kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya realisasi program/ kegiatan yang sesuai dengan terget kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan adalah:

a. Adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja sehingga realisasi program/ kegiatan dapat dicapai sesuai harapan;
b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia;
c. Adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 yang selaras dengan

pencapaian target masing-masing kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Indikator	Satuan	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realiasai Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun* 2024	Tahun** 2025	Tahun*** 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				((7)				(8)
1	Nilai AKIP PD	Predikat		(Predikat)	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
2	Opini BPK atas LKPD	Opini		Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan tepat waktu	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase SKPD yang menyusun laporan BMD secara akurat, akuntabel dan tepat waktu	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bupati Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Kepala BKAD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bertindak selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini mempunyai tugas antara lain :

1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2) mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4) menetapkan SPD;
5) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; dan
6) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan ketentuan tersebut, serta menyikapi dinamika kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD/ Perubahan APBD, diarahkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi utamanya ekonomi berbasis kreatifitas (ekonomi kreatif), lingkungan hidup, kemiskinan serta pengangguran, Unit Reaksi Cepat (URC) pendampingan pengelolaan keuangan kabupaten/kota, Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai dan isu-isu strategis lainnya, yang dijabarkan dalam program kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai bidang urusan, kebutuhan dan karakter daerah masing-masing. dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, antara lain :

a. Posisi strategis BKAD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, serta selaku Perangkat Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ;
b. Posisi strategis B K A D antara lain melaksanakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
c. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BKAD) mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) yang berwenang mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah. Untuk itu, BKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

d. Peraturan perundang-undangan/regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan dan tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT :

1. Strength (Kekuatan)

   1) Meningkatnya komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

   2) Memiliki fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

   3) Melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran.

2. Weaknes (Kelemahan)

   1) Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.

   2) Belum optimalnya pemanfaatan kesempatan dalam rangka peningkatan pendidikan formal / informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi.

3. Opportunity (Peluang)

1) Pembangunan jaringan TIK terintegrasi (*e-government*) di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir.
2) Adanya diklat, seminar, bintek workshop dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, perguruan tinggi dan konsultan / swasta.
3) Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
4) Kepercayaan pimpinan serta kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.

4. Treath (Ancaman)

1) Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat.
2) Inkonsistensi dan tidak sinkronnya antara pelaksanaan program kegiatan dengan dokumen perencanaan dan dinamika yang berkembang.
3) Masih kurangnya kompentensi dan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset daerah pada tiap Perangkat Daerah.
4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
5) Perbedaan persepsi dalam memaknai peraturan dengan pemeriksa fungsional.
6) Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.

Perumusan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan oleh BKAD Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya :

1. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Penerapan laporan keuangan daerah dengan sistem akuntansi berbasis akrual;
3. Pelayanan pengelolaan kas daerah dan gaji PNSD berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan sistem aplikasi pengelolaan barang milik daerah;
5. Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang;
6. Pelayanan prima;
7. Peningkatan profesionalismne aparatur dan pemenuhan SDM yang handal sesual tuntutan kebutuhan;
8. Integrasi e-planning dan e-budgeting;
9. Integrasi Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah;
10. Pengintegrasian Standar Satuan Harga dan Satuan Harga Online.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Kab. Inhil	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi***	**Persen**	**100**	**20.639.628.000,00**	1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			Kab. Inhil	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi***	**Persen**	**100**	**20.639.628.000,00**	
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun*	Persen	100	65.584.000,00	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi, Verifikasi Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun*	Persen	100	65.584.000,00	
		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	2	27.992.000,00		1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dokumen	2	27.992.000,00	
		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Laporan	1	37.592.000,00		1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Laporan	1	37.592.000,00	
	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar*	Persen	100	11.753.982.000,00	1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar*	Persen	100	11.753.982.000,00	
		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Inhil	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	64	11.731.492.000,00		1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Inhil	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Orang/bulan	64	11.731.492.000,00	
		1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Laporan	60	22.490.000,00		1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	Laporan	60	22.490.000,00	
	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi*	Persen	100	393.607.300,00	1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Persentase aparatur yang mengikuti diklat/ pengembangan kompetensi*	Persen	100	393.607.300,00	

		1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Inhil	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	24	271.920.000,00			1.3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Inhil	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	Orang	24	271.920.000,00
		1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Orang	100	121.687.300,00			1.3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Inhil	*Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	Orang	100	121.687.300,00
	1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Persentase sarana prasarana adminiistrasi perkantoran dalam kondisi baik*	Persen	100	3.084.725.000,00		1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Inhil	*Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik*	Persen	100	3.084.725.000,00
		1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	11	114.500.000,00			1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*	Paket	11	114.500.000,00
		1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	6	500.240.000,00			1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	Paket	6	500.240.000,00
		1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	5	104.350.000,00			1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*	Paket	5	104.350.000,00
		1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Paket	6	349.500.000,00			1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*	Paket	6	349.500.000,00
		1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	11	76.000.000,00			1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Inhil	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*	Paket	11	76.000.000,00
		1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Dokumen	3200	30.000.000,00			1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	Dokumen	3200	30.000.000,00
		1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	1	1.910.135.000,00			1.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	Laporan	1	1.910.135.000,00
	1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah*	Persen	100	105.350.000,00		1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah*	Persen	100	105.350.000,00
		1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Unit	2	105.350.000,00			1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	*Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan*	Unit	2	105.350.000,00
	1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor*	Persen	100	662.746.000,00		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor*	Persen	100	662.746.000,00
		1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Laporan	1	21.950.000,00			1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	Laporan	1	21.950.000,00
		1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	3	248.000.000,00			1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Laporan	3	248.000.000,00

		1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Laporan	4	392.796.000,00			1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*	Lapor an	4	392.796.000,00
	1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah*	Persen	100	4.573.633.700,00		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah*	Perse n	100	4.573.633.700,00
		1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	40	1.959.150.100,00			1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Inhil	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	Unit	40	1.959.150.100,00
		1.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	Unit	4	2.031.294.600,00			1.7.2	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara*	Unit	4	2.031.294.600,00
		1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	1	206.189.000,00			1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	1	206.189.000,00
		1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	158	377.000.000,00			1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	Unit	158	377.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Kab. Inhil	***Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu***	**Persen**	**100**	**358.371.103.682,00**	2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			Kab. Inhil	***Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu***	**Perse n**	**100**	**358.371.103.682,00**
	2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kab. Inhil	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	Persen	100	2.362.404.950,00		2.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Kab. Inhil	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	Perse n	100	2.362.404.950,00
		2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	Dokumen	2	158.852.000,00			2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun*	Doku men	2	158.852.000,00
		2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	Dokumen	2	157.023.000,00			2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun*	Doku men	2	157.023.000,00
		2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Inhil	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	Dokumen	8	1.125.170.650,00			2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Inhil	*Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	Doku men	8	1.125.170.650,00
		2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Inhil	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	Dokumen	2	556.674.300,00			2.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Inhil	*Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	Doku men	2	556.674.300,00
		2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	Dokumen	5	364.685.000,00			2.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	Doku men	5	364.685.000,00
	2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD*	Persen	100	2.466.992.482,00		2.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Pengeluaran Kas Daerah Terhadap Belanja dan Pembiayaan Daerah di Dalam APBD*	Perse n	100	2.466.992.482,00

		2.2.1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	Dokumen	29	456.254.000,00			2.2.1	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	Dokumen	29	456.254.000,00
		2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	Laporan	24	665.259.982,00			2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	Laporan	24	665.259.982,00
		2.2.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	Dokumen	2	576.173.000,00			2.2.3	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait*	Dokumen	2	576.173.000,00
		2.2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Inhil	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	Dokumen	1	769.305.500,00			2.2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Inhil	*Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan*	Dokumen	1	769.305.500,00
	2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kab. Inhil	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	Persen	100	2.701.383.350,00		2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kab. Inhil	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	Persen	100	2.701.383.350,00
		2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	Laporan	4	307.339.500,00			2.3.1	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	Laporan	4	307.339.500,00
		2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	Laporan	2	1.416.009.450,00			2.3.2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi*	Laporan	2	1.416.009.450,00

		2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	Dokumen	4	699.593.000,00			2.3.3	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	*Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*	Dokumen	4	699.593.000,00
		2.3.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	Dokumen	1	278.441.400,00			2.3.4	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah*	Dokumen	1	278.441.400,00
	2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab. Inhil	*Bagi hasil kabupaten/kota dan desa*	Persen	100	350.194.000.000,00		2.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Kab. Inhil	*Bagi hasil kabupaten/kota dan desa*	Persen	100	350.194.000.000,00
		2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	Laporan	1	294.843.000.000,00			2.4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	Laporan	1	294.843.000.000,00
		2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	Laporan	1	50.000.000.000,00			2.4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	Laporan	1	50.000.000.000,00
		2.4.3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	Laporan	1	5.351.000.000,00			2.4.3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota*	Laporan	1	5.351.000.000,00
	2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola*	Persen	100	646.322.900,00		2.5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dikelola*	Persen	100	646.322.900,00
		2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	Dokumen	2	646.322.900,00			2.5.1	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	Dokumen	2	646.322.900,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			Kab. Inhil	***Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu***	**Persen**	**100**	**4.297.107.318,00**	3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			Kab. Inhil	***Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Aset Tepat Waktu***	**Persen**	**100**	**4.297.107.318,00**
	3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD*	Persen	100	4.297.107.318,00		3.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Inhil	*Persentase Rekonsiliasi Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan BMD*	Persen	100	4.297.107.318,00
		3.1.1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Dokumen	2	554.482.400,00			3.1.1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah*	Dokumen	2	554.482.400,00
		3.1.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	Laporan	10	422.729.200,00			3.1.2	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah*	Laporan	10	422.729.200,00
		3.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	Laporan	4	1.454.697.648,00			3.1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah*	Laporan	4	1.454.697.648,00

			3.1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	Dokumen	2	594.287.500,00			3.1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	Dokumen	2	594.287.500,00	
			3.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Laporan	10	993.847.300,00			3.1.5	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Inhil	*Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	Laporan	10	993.847.300,00	
			3.1.6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Orang	3	277.063.270,00			3.1.6	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Inhil	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*	Orang	3	277.063.270,00	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pembandingan antara program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BKAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dalam menjalankan visi dan misi Bupati Indragiri Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di bidang keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun, dalam melaksanakan fungsi tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Indragiri Hilir

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Program . . .					
	1.1 Kegiatan . . .					
	1.1.1 Sub Kegiatan . . .					
	1.1.2 Sub Kegiatan . . .					
	1.1.3 Sub Kegiatan . . .					
	1.1.4 Sub Kegiatan . . .					
	1.1.5 Sub Kegiatan . . .					
	Dst . . .					

N I H I L

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun program pembangunan nasional dimana sekarang dikenal sebagai Program Nawacita yang merupakan program pembangunan perencanaan nasional yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Untuk mendorong pelaksanaan program tersebut perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas desentralisasi, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, adalah:

- Terjaganya kesinambungan fiskal;
- Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
- Pembangunan sistem penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
- Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan transfer ke daerah;
- Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
- Peningkatan pengawasan dibidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
- Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance dan kelembagaan.

Sedangkan kebijakan dalam RPJMD yang ingin ditetapkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Visi dan Misi adalah:

- Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Berbasis Kinerja
- Melaksanakan Pengendalian Belanja Sesuai Dengan Perencanaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai tujuan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun **tujuan** yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Govermance) di BKAD
2. Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara teratur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun sasaran merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun **Sasaran** yang ingin dicapai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Program kerja BKAD Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 3 Program meliputi:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan dari program yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah, BKAD memiliki 3 Program 13 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh PD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPD Kabupaten Indragiri Hilir 2024-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagimana tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya mengalir ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Tabel 4.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAHKAB. INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						390.288.000.000,00							390.288.000.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						390.288.000.000,00							390.288.000.000,00	
	5	02				KEUANGAN						390.288.000.000,00							390.288.000.000,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	24.088.000.000,00						-	24.088.000.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	70.000.000,00	
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				72 Laporan	40.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		40.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	16.173.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	16.173.000.000,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	16.150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		16.150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				60 Laporan	23.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		23.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	350.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	350.000.000,00	
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				24 Orang	200.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	3.270.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	3.270.000.000,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan				11 Paket	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengaw	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Bangunan Kantor yang Disediakan						Kel/Desa			asan Pengelo laan Keuang an Daerah				
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan				6 Paket	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw asan Pengelo laan Keuang an Daerah	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw asan Pengelo laan Keuang an Daerah	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	350.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw asan Pengelo laan Keuang an Daerah	-		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan				11 Paket	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw asan Pengelo laan Keuang an Daerah	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3200 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw asan Pengelo laan Keuang an Daerah	-		20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw asan Pengelo laan Keuang an Daerah	-		2.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-			-	150.000.000,00			-	Peningk atan Pengen dalian dan Pengaw	-	-	150.000.000,00	

						Pemerintah Daerah										asan Pengelolaan Keuangan Daerah				
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		150.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	675.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	675.000.000,00	
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				100 Laporan	25.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	400.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		400.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	3.400.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	3.400.000.000,00	
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara				100 Unit	900.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelo	-		900.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya									laan Keuangan Daerah				
	5	02	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				100 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				100 Unit	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	362.550.000.000,00						-	362.550.000.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.900.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	1.900.000.000,00	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														

							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				8 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				5 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	2.600.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan	-	-	2.600.000.000,00	

																Pengelolaan Keuangan Daerah				
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				29 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan				24 Laporan	700.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		700.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	800.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		800.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	1.900.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	1.900.000.000,00	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	200.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		1.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelengg				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelo	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							araan Akuntansi Pemerintah Daerah								laan Keuangan Daerah				
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	355.500.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	355.500.000.000,00	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				100 Laporan	300.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		300.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				100 Laporan	50.000.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		50.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														

							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/ Kota				100 Laporan	5.500.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		5.500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	650.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	650.000.000,00	
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				2 Dokumen	650.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		650.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-			-	3.650.000.000,00						-	3.650.000.000,00	

	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	3.650.000.000,00			-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-	3.650.000.000,00	
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	950.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		950.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				10 Laporan	200.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				4 Laporan	1.350.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan	-		1.350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

																Pengelolaan Keuangan Daerah				
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				10 Laporan	600.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah	-		600.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah				3 Orang	250.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan	-		250.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Kabupaten/ Kota									Keuangan Daerah				
	J U M L A H										**390.288.000.000,00**								**390.288.000.000,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan yang dioperasionalkan melalui rencana pembangunan daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

. Secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan.
2. Dengan dokumen renja ini diharapkan dapat direncanakan berapa alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi utamanya dalam pengelolaan keuangan dan aset dimana saat ini penerapan laporan keuangan berbasis akrual, penerapan teknologi informasi dengan diterapkannya intergrasi e-planning dan e-budgeting, pengintegrasian standar satuan harga dengan satuan harga online, dan integrasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah yang terintegrasi secara online.
3. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) BKAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara pelaksanaan anggaran pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf BKAD Kabupaten Indragiri Hilir secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Indragiri Hilir, Februari 2025

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NURRAHMAN, SE., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19791223 199905 1 001